



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/KEPMEN-KP/2019

TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019, yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.
- KETIGA : Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, wajib dilengkapi dengan kajian tertulis dan mendapat izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, tetapi belum dapat ditetapkan pada Tahun 2018 akan menjadi prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16/KEPMEN-KP/2019
 TENTANG
 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2019.

MATRIK USULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
1.	Peraturan Pemerintah	Izin Lokasi di Laut	Memuat pengaturan mengenai Izin Lokasi di Laut meliputi: a. Perizinan pemanfaatan ruang laut secara menetap di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi; b. Jenis-jenis pemanfaatan ruang laut; c. Kewenangan pemberian izin; d. Masa berlaku izin;														Luncuran 2018	Prosun

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
			e. Batasan luasan izin; f. Penatausahaan perizinan; dan g. Pelaporan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi.															
2.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi Laut Jawa	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi Laut Jawa, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.														Luncuran 2018	Prosun

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
3.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi Selat Makassar	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi Selat Makassar, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.														Luncuran 2018	Prosun
4.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi Teluk Tomini	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi Teluk Tomini, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang;														Luncuran 2018	Prosun

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.														
5.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi Laut Sulawesi	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi Laut Sulawesi, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
10.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Selat Malaka	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi Kawasan Antarwilayah di Selat Malaka, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.														
11.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi KSN Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) termasuk Kepulauan Seribu	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi KSN Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.														
12.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi KSN Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK)	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi KSN BBK, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN			
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES				
			f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.																
13.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi KSN Kawasan Perkotaan Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Maminasata)	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi KSN Maminasata, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.														Luncuran 2018	Prosun	
14.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi KSN	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi KSN															Luncuran 2018	Prosun

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
		Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila)	Gerbangkertosusila, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.															
15.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi KSN Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedung Sepur)	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi KSN Kedungsepur, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang;															Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.														
16.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi KSN Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro)	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi KSN Mebidangro, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			h. Indikasi Program.													
17.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi KSN Kawasan Taman Nasional Komodo, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.													
18.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi KSN Kawasan Bima	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi KSN Kawasan Bima, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi;													Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			h. Indikasi Program.														
24.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.														
25.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Raya dan Pulau Rusa di Provinsi Aceh	Memuat pengaturan mengenai Rencana Zonasi KSNT Pulau Raya dan Pulau Rusa di Provinsi Aceh, meliputi: a. peran dan fungsi;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			b. wilayah perencanaan; c. tujuan, kebijakan dan strategi perencanaan ruang; d. rencana struktur ruang; e. rencana pola ruang; f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.														
26.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Cluster Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Mangkai, Pulau Damar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Berlayar)	Memuat pengaturan mengenai Rencana Zonasi KSNT Cluaster Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Mangkai, Pulau Damar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Berlayar, meliputi: a. peran dan fungsi; b. wilayah perencanaan; c. tujuan, kebijakan dan strategi perencanaan ruang;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			d. rencana struktur ruang; e. rencana pola ruang; f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.														
27.	Peraturan Menteri	Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengaturan mengenai Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, meliputi: a. Ruang lingkup perizinan reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. Jenis Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan; d. Tata cara penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			e. Pelaksanaan teknis reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. Pelaksanaan reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; g. Akses masyarakat yang wajib diberikan; h. Kompensasi; i. Relokasi pemukiman; j. Kewajiban pemegang izin pelaksanaan reklamasi; k. Monitoring dan evaluasi; l. Sanksi.														
28.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengaturan mengenai Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan PPK, meliputi: a. Ruang lingkup; b. Kewenangan;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			c. Masa berlaku dan berakhirnya Izin Lokasi; d. Luasan Izin Lokasi Perairan; e. Perizinan Di Pulau Kecil; f. Izin Pengelolaan Perairan; g. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Pengelolaan Perairan; h. Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan; i. Luasan Izin Pengelolaan Perairan; j. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional; k. Penatausahaan Perizinan; l. Pelaporan; dan m. Sanksi.														
29.	Peraturan Menteri	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya dalam rangka	Pengaturan mengenai Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
		penanaman modal asing dan Rekomendasi Pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 km ²	Perairan Sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dan Rekomendasi Pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 km ² , meliputi: a. Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing; dan b. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di bawah 100 km ² .															
30.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Ditjen PRL	Pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Ditjen PRL, meliputi: a. Kedudukan; b. Tugas dan fungsi; c. Klasifikasi; d. Wilayah kerja; e. Lokasi; dan f. Struktur organisasi.														Luncuran 2018	Prosun
31.	Peraturan Menteri	Tata Cara Survei, Pengangkatan, dan Pemanfaat Benda	Pengaturan mengenai Tata Cara Survei,														Luncuran 2018	Prosun

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
		Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam oleh Pemerintah	Pengangkatan, dan Pemanfaat Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam oleh Pemerintah, meliputi: a. pengelolaan BMKT dilaksanakan dengan: survei, pengangkatan, dan pemanfaatan; b. dalam rangka survei dan pengangkatan BMKT, PANNAS BMKT membentuk Tim Kerja Survei; dan c. penggunaan dan pemanfaatan BMN.														
32.	Peraturan Menteri	Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Pengaturan mengenai Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, meliputi: a. Persyaratan penilaian angka kredit jabatan PELP; b. Tim Penilai;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			c. Hak dan kewajiban pejabat PELP dan Tim Penilai; dan d. Standar Kualitas Hasil kerja PELP.														
33.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu	Pengaturan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, meliputi Tata cara penyusunan RZ KSN dan RZ KSNT.														
34.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Sebatik dan Karang Unarang di Provinsi Kalimantan Utara	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi strategis nasional tertentu Pulau Sebatik dan Karang Unarang di Provinsi Kalimantan Utara, meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
			e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.															
35.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Selaru, Pulau Asutubun dan Pulau Batarkusu di Provinsi Maluku	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi strategis nasional tertentu Pulau Selaru, Pulau Asutubun dan Pulau Batarkusu di Provinsi Maluku Peraturan Menteri tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Selaru, Pulau Asutubun dan Pulau Batarkusu di Provinsi Maluku meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang;														Luncuran 2018	Prosun

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.														
36.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus PPKT Baruberangsang di Provinsi Riau	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi strategis nasional tertentu Pulau Selaru, Pulau Gugus PPKT Baruberangsang di Provinsi Riau meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
			h. Indikasi Program.															
39.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Berhala di Provinsi Sumatera Utara	Memuat pengaturan mengenai rencana zonasi strategis nasional tertentu Peraturan Menteri tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Berhala di Provinsi Sumatera Utara meliputi: a. Jangka Waktu, Kedudukan dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat; dan h. Indikasi Program.														Luncuran 2018	Prosun

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			2014 tentang Kelautan														
48.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengaturan mengenai Pengelolaan Kawasan Konservasi, meliputi simplifikasi atas: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. b. Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. c. Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Tata														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
		Penanaman Modal Asing dan Untuk Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km ²	<p>untuk Penanaman Modal Asing dan Untuk Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km², meliputi:</p> <p>a. Kriteria Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing; dan</p> <p>b. Kriteria Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di bawah 100 Km².</p>															
57.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu	<p>penetapan mengenai Status Perlindungan Ikan Hiu, meliputi:</p> <p>a. penetapan ikan hiu yang terdiri dari 112 (seratus dua belas) spesies sebagai jenis ikan yang dilindungi;</p> <p>b. perlindungan ikan hiu dengan status perlindungan terbatas berdasarkan:</p> <p>1) sebagian tahapan siklus hidup; dan</p>															Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			pelabuhan perikanan; i. Pelabuhan yang tidak dibangun oleh pemerintah; dan j. Pengelolaan tempat pemasaran ikan.														
3.	Peraturan Menteri	Usaha Perikanan Tangkap	a. Jenis usaha perikanan tangkap; b. Perizinan; c. Surat izin usaha perikanan; d. Pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; e. Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan; f. Surat izin penangkapan ikan; g. Surat izin kapal pengangkut ikan; h. Tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil; i. Daerah penangkapan ikan dan pelabuhan pangkalan; j. Alih muatan (<i>transhipment</i>);														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			c. Etika penyusunan karya tulis ilmiah.														
6.	Peraturan Menteri	Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	<p>a. Lembar Awal, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Pernyataan Importasi;</p> <p>b. Kewenanga Penerbitan Lembar Awal, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, dan Pernyataan Importasi;</p> <p>c. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Lembar Awal, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, dan Pernyataan Importasi;</p> <p>d. Pembinaan dan Pelaporan.</p>														Luncuran Prosun 2018
7.	Peraturan Menteri	Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	<p>a. Kedudukan dan tugas Komisi Pengelolaan Perikanan;</p> <p>b. Kelengkapan Organisasi Komisi Pengelolaan Perikanan;</p> <p>c. Mekanisme kerja Komisi</p>														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			e. Pelaporan													
10.	Peraturan Menteri	Log book Penangkapan Ikan	a. Jenis <i>log book</i> ; b. Kewajiban <i>log book</i> pengkapan ikan; dan c. Mekanisme penyampaian dan pelaporan <i>log book</i> pengkapan ikan													
11.	Keputusan Menteri	Produktivitas Kapal Perikanan	Penetapan Produktivitas kapal penangkap ikan dengan pertimbangan: a. Ukuran tonnage kapal; b. Bahan kapal yang digunakan kayu atau besi/fiber; c. Kekuatan mesin kapal; d. Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan; e. Jumlah trip operasi penangkapan per tahun; f. Kemampuan tangkap rata-rata per trip; dan g. Wilayah penangkapan ikan													

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Usaha Pembudidayaan Ikan	a. Jenis usaha bidang usaha perikanan budidaya; b. Layanan perizinan bidang perikanan budidaya; c. Mekanisme pelaporan penerima perizinan; dan d. Pengawasan perizinan bidang usaha perikanan budidaya.													Luncuran Prosun 2018
2.	Peraturan Menteri	Obat Ikan	a. Penyediaan dan peredaran Obat Ikan; b. Layanan sertifikasi dan surat keterangan; c. Pelaporan; dan d. Pengawasan.													Luncuran Prosun 2018
3.	Peraturan Menteri	Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam	a. Penyusunan perencanaan; b. Perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam; c. Pemberdayaan nelayan,													Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			pembudi daya ikan dan petambak garam; d. Pendanaan dan pembiayaan; dan e. Pengawasan.														
4.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan	a. Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang Polkeskan b. Unsur dan Uraian Kegiatan Polkeskan c. Pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan kembali; dan d. Sasaran Kerja Pegawai, Target Angka Kredit, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit.														Luncuran Prosun 2018
5.	Peraturan Menteri	Pengendalian Penyakit Ikan	a. Ketentuan mengenai survailen dan monitoring;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			b. Ketentuan mengenai analisis risiko; c. Ketentuan mengenai penanganan penyakit ikan; dan d. Ketentuan mengenai tanggap darurat.														
6.	Peraturan Menteri	Kawasan Budi Daya Perikanan	a. Persyaratan suatu lahan dapat ditetapkan sebagai kawasan budidaya perikanan; b. Tata cara suatu lahan dapat ditetapkan sebagai kawasan budidaya perikanan; dan c. Mekanisme Penetapan suatu lahan dapat sebagai kawasan budidaya perikanan.														Luncuran Prosun 2018
7.	Peraturan Menteri	Jenis Ikan yang Dilarang Dimasukan, Diperdagangkan dan Dikeluarkan dari dan ke Wilayah RI	a. Larangan dan Pengecualian Jenis Ikan yang dimasukan; b. Larangan dan Pengecualian Jenis Ikan yang di														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			Perdagangan; dan c. Larangan dan Pengecualian Jenis Ikan yang di keluarkan.													
8.	Peraturan Menteri	Pengendalian Residu	a. Monitoring Residu; b. Investigasi; c. Tindakan Perbaikan; dan d. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu.													
9.	Peraturan Menteri	Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya	a. Identifikasi penyebab pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan; b. Metode Rehabilitasi; dan c. Pelaksanaan Rehabilitasi.													
10.	Peraturan Menteri	Kesejahteraan Ikan	a. Pembudidayaan; b. Pengangkutan; c. Pemingsanan; dan d. Pematian Ikan.													
11.	Keputusan Menteri	Pedoman Pembudidayaan Rumput Laut	a. potensi pengembangan Rumput Laut Indonesia; b. persyaratan pembudidayaan Rumput Laut;													Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			c. metode budidaya Rumput Laut; d. pemanenan Rumput Laut; e. pengelolaan kesehatan dan lingkungan; f. sumber daya manusia; dan g. pembinaan, monitoring, dan evaluasi.														
12.	Keputusan Menteri	Uraian Jabatan dan Peta jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Menetapkan uraian jabatan dan peta jabatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya														Luncuran Prosun 2018

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Peraturan Menteri	Kemitraan pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Bidang Usaha; b. Prinsip Kemitraan; c. Pola Kemitraan; d. Persyaratan dan Tata Cara Bermitra; e. Perjanjian kemitraan; f. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi; dan g. Pembinaan.														Luncuran Prosun 2018
2.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	a. Kedudukan; b. Tugas dan Fungsi; c. Klasifikasi; d. Wilayah Kerja e. Lokasi; dan f. Struktur Organisasi														Luncuran Prosun 2018
3.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	a. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; b. Unsur Kegiatan dan Butir Kegiatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			c. Pengangkatan, Peralihan Jenjang Jabatan Keterampilan ke Jenjang Jabatan Keahlian, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pemberhentian dari Jabatan, dan Pengangkatan Kembali; dan d. Sasaran Kerja Pegawai, Target Angka Kredit, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit.														
4.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	a. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; b. Unsur Kegiatan dan Butir Kegiatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; c. Pengangkatan, Peralihan Jenjang Jabatan Keterampilan Ke														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			Jenjang Jabatan Keahlian, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pemberhentian Dari Jabatan, dan Pengangkatan Kembali; dan d. Sasaran Kerja Pegawai, Target Angka Kredit, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit.														
5.	Peraturan Menteri	Sertifikat Kelayakan Pengolahan	a. Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi; b. Layanan SKP; c. Pengawasan; dan d. Pembinaan														Luncuran Prosun 2018
6.	Peraturan Menteri	Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional	a. Registrasi; b. Mekanisme stelina; c. Verifikasi; d. Pelaporan; dan e. Pengendalian														
7.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pemberian Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Sarden	a. Persyaratan dan tata cara penerbitan persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
		dan Makarel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib	dalam Kemasan Kaleng dan Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib b. Pembinaan; dan c. Pengawasan dan Pelaporan														
8.	Peraturan Menteri	Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.	a. Menetapkan LSPro sebanyak 14 lembaga; b. Menetapkan laboratorium Penguji sebanyak 14; c. Kewajiban Lembaga sertifikasi produk dan laboratorium penguji; dan d. Monitoring dan evaluasi														Luncuran Prosun 2018
9.	Peraturan Menteri	Pedoman Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Bidang usaha KUR sector Kelautan dan Perikanan; b. Bidang udaha yang dibiayai; c. Penyaluran KUR; d. Persyaratan dan kewajiban penerima KUR; e. Mekanisme pengajuan, penyaluran, pengembalian, dan agunan KUR;														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			f. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan g. Pencabutan Permen KP 73/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman KUR														
10.	Peraturan Menteri	Usaha Pemasaran Ikan	a. Jenis usaha pemasaran ikan; b. Layanan perizinan c. pelaporan; dan d. Pembinaan usaha pemasaran ikan														
11.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	Tugas pokok dan struktur organisasi balai														Luncuran Prosun 2018
12.	Keputusan Menteri	Uraian Jabatan dan Peta jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Menetapkan uraian jabatan dan peta jabatan lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan														Luncuran Prosun 2018

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Peraturan Menteri	Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Berbendera Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan.	a. dasar tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang Perikanan; b. prosedur tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing; dan c. pelaporan.														Luncuran Prosun 2018
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	a. Kelembagaan SPKP b. Prasarana dan Sarana SPKP c. Penyedia SPKP d. Pemasangan dan Aktivasi Transmitter SPKP e. Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian Surat Keterangan Aktivasi Transmitter f. Hak, Kewajiban, dan Larangan g. kepemilikan data; dan h. evaluasi.														Luncuran Prosun 2018
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Kepmen KP Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan	a. pembentukan Pokmaswas; b. tugas, fungsi, dan peran pokmaswas; c. penilaian dan penghargaan														

6. Inspektorat Jenderal

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Adanya integrase pelaporan gratifikasi dengan aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi														- Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2.	Peraturan Menteri	Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perubahan kriteria unit kerja yang dapat diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM														- Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3.	Keputusan Menteri	Komisi Pengawasan	Penetapan anggota Komisi Pengawasan														- Hasil evaluasi kapabilitas Itjen KKP (IACM) oleh BPKP

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
6.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Konservasi Kelautan dan Perikanan	a. Perubahan nomenklatur; dan b. Organisasi dan Tata Kerja													
7.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	a. Perubahan nomenklatur; b. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja													
8.	Peraturan Menteri	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Kelautan dan Perikanan	a. Perubahan nomenklatur; b. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja													
9.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Perikanan	a. Perubahan nomenklatur; b. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja													
10.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Statuta Politeknik KP Jembrana	Penyelenggaraan pendidikan vokasi, pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, meliputi: a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; b. Susunan Organisasi; c. Tata Kerja; d. Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian; e. Ketentuan Lain-lain; dan f. Penutup													Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
11.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik KP Jembrana	a. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, meliputi: b. Ketentuan umum; c. Identitas; d. Tujuan dan Rencana Arah Pengembangan; e. Organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan; f. Pengangkatan dan Pemberhentian; g. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal; h. Sistem Penjaminan Mutu Internal; i. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; j. Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan; k. Gelar dan Penghargaan; l. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; m. Taruna dan akademi;													Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			c. Tata Cara Penyesuaian (<i>Inpassing</i>); dan d. Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian <i>Inpassing</i> .													
4.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Melalui Impassing	a. Persyaratan Penyesuaian (<i>Inpassing</i>) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; b. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian (<i>Inpassing</i>); c. Tata Cara Penyesuaian (<i>Inpassing</i>); dan d. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (<i>Inpassing</i>).													
5.	Peraturan Menteri	Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa	a. Persyaratan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;													Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
		Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Inspektur Mutu Hasil Perikanan; c. penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; dan d. tata cara pengusulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.														
10.	Keputusan Menteri	Uraian jabatan dan peta jabatan lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Uraian Jabatan dan Peta jabatan Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.														
11.	Keputusan Menteri	Sub Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Persyaratan dan Prosedur Keanggotaan Sub Jejaring; b. Kepengurusan dan keanggotaan Sub Jejaring; dan c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.														Luncuran Prosun 2018

11. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>a. Menghapus Pasal 29 terkait mandat penyusunan strategi komunikasi (Strakom) ke dalam Peraturan Menteri;</p> <p>b. Dimandatkan untuk disusun Strakom adalah: Program/Kebijakan Prioritas KKP/unit kerja eselon I;</p> <p>c. Sifat penyusunan Strakom adalah “tidak wajib”, hanya “dapat”;</p> <p>d. Unit kehumasan Kementerian (BHKLN) mengoordinasikan penyusunan Strakom Program/Kebijakan Prioritas dengan melibatkan unit eselon I;</p> <p>e. Unit kehumasan eselon I dapat menyusun Strakom untuk program/kebijakan</p>													Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
			yang menjadi prioritas di eselon I masing-masing; dan f. Lampiran Permen berupa: Pedoman Penyusunan Strategi Komunikasi Program/Kebijakan Prioritas, beserta template dan contoh Strakom-nya.														
2.	Peraturan Menteri	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Permen ini bertujuan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan-nya karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di lingkungan KKP, serta memfasilitasi pendaftaran ISBN dan ISSN														Luncuran Prosun 2018
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 perlu diperbarui dengan: 1) Klasifikasi Informasi; 2) Mekanisme memperoleh informasi; dan														Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Kelautan dan Perikanan	3) Susunan, Tugas, dan Tanggung Jawab dan wewenang PPID. b. Pengaturan terkait Keberatan pemohon informasi; dan c. Sengketa Informasi.													
4.	Peraturan Menteri	Pengelola Konten Website Kementerian Kelautan dan Perikanan	Permen ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan konten Situs Web di lingkungan KKP, yang terdiri dari: a. Keseragaman tampilan; b. Menu; c. Konten; dan d. Siapa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaannya.													
5.	Keputusan Menteri	Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													Luncuran Prosun 2018

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
3.	Peraturan Menteri	Penatausahaan Persediaan	a. Ketentuan Umum b. Penatausahaan Persediaan c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian d. Penyelesaian Kerugian Negara e. Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban														
4.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Ketentuan umum; b. Struktur pejabat pengelola BMN; dan c. Mekanisme pengelolaan BMN.														
5.	Peraturan Menteri	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	a. Struktur pejabat pengelola anggaran dan pejabat pengelola BMN;														Luncuran Prosun 2018

13. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Peraturan Menteri	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2016 tentang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Penyempurnaan materi mengenai retensi arsip; b. Penyempurnaan materi mengenai penyusutan arsip; dan c. Penyempurnaan materi mengenai pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.														Luncuran Prosun 2018
2.	Peraturan Menteri	Tata Naskah Dinas Elektronik	a. Media perekaman Naskah Dinas; b. Struktur Naskah Dinas; c. Penyiapan Naskah Dinas; d. Pengabsahan dan autentikasi; e. Pengamanan; dan f. Pengiriman.														Luncuran Prosun 2018

14. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	a. Persyaratan dan mekanisme; b. Bentuk, format, dan masa berlaku; c. Biaya; d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan e. Pembinaan.														

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Martini

